



INTISARI

Pembangunan fasilitas pelayanan sosial ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah kesenjangan wilayah khususnya antara daerah pusat dengan daerah belakangnya (buriloka). Pembangunan fasilitas tersebut menghendaki adanya penempatan lokasi. Tulisan ini merupakan hasil penelitian untuk mengungkap pusat-pusat pelayanan alternatif dan hirarkinya di Kabupaten Toba Samosir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi wilayah yang meliputi potensi fisik dan sosial ekonomi masing-masing kecamatan dan mengetahui alternatif hirarki pusat-pusat pelayanan berdasarkan potensi fisik dan sosial ekonomi wilayah, konsentrasi penduduk dan hirarki kota-kota atau hirarki pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisa data sekunder. Data yang digunakan merupakan dokumentasi dan catatan statistik yang dikumpulkan dari beberapa instansi pemerintah maupun lembaga lain yang terkait. Analisa data menggunakan analisis kuantitatif berupa skalogram, scoring dan klasifikasi, teknik analisis statistik terutama analisis korelasi dan regresi, dan analisis deskriptif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kecamatan Balige, Laguboti dan Pangururan termasuk kecamatan yang mempunyai tingkat potensi wilayah tinggi. Kecamatan Porsea, Silaen, dan Simanindo termasuk kecamatan yang mempunyai tingkat potensi wilayah sedang dan Kecamatan Lumban Julu, Habinsaran, Harian, Palipi, Onan Runggu dan Sianjur Mula-mula termasuk kecamatan yang mempunyai tingkat potensi wilayah rendah. Kecamatan yang berpotensi menjadi pusat-pusat pelayanan adalah Kecamatan Balige sebagai pusat pelayanan hirarki I, Kecamatan Pangururan, Porsea dan Simanindo sebagai pusat pelayanan hirarki II, Kecamatan Onan Runggu, Lumban Julu, Habinsaran, Laguboti, Silaen, Palipi, Harian dan Sianjur Mula-mula merupakan pusat pelayanan hirarki III.

Dalam pembangunan fasilitas pelayanan perlu dipertimbangkan potensi fisik dan sosial ekonomi wilayah dengan memprioritaskan daerah yang mempunyai kondisi fasilitas pelayanan sosial ekonomi rendah. Pembangunan fasilitas ini adalah dengan memperhatikan aksesibilitas wilayah untuk mempermudah jangkauan pelayanan serta meningkatkan fungsi kecamatan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pelayanan sehingga benar-benar berfungsi dalam melayani daerah burilokanya serta dapat mengembangkan pusat-pusat pelayanan pada hirarki di bawahnya.



ABSTRACT

Development of the social-economic service facilities is one ways to handle a regional inequality especially between the center area and its hinterland. Development of these facilities demands the availability of location placement. This yield of research to reveal an alternative service centers and its hierarchy in Regency of Toba Samosir. The purpose of research is to observe an area potency including physical and social-economic potency of each sub district and to knows hierarchy alternative of the service centers based on physical potency and area social-economic, population concentration, and city hierarchy or hierarchy on social-economic service centers.

The method applied in this research was secondary data analysis method. Data used was documentation and statistic records that collected from several government instances or another concerned institution. The data was analyzed using quantitative analysis in shape of scalogram, scoring and classification, statistic analysis technique particularly correlation and regression analysis, and descriptive analysis.

The result of research suggested that Sub district of Balige, Laguboti and Pangururan was included the sub district which has a high area potency level. Sub district of Porsea, Silaen, and Simanindo was included the sub district which has a middle area potency level and Sub district of Lumban Julu, Habinsaran, Harian, Palipi, Onan Runggu and Sianjur Mula-mula was included the sub district which has a lower area potency level. The Sub district which has potency to be service centers is Sub district of Balige as hierarchy I service centers, Sub district of Pangururan, Porsea and Simanindo as hierarchy II service centers, Sub district of Onan Runggu, Lumban Julu, Habinsaran, Laguboti, Silaen, Palipi, Harian and Sianjur Mula-mula as hierarchy III service centers.

Development of the service facilities must consider a physical potency and area social-economic with priority the area that has facilities condition on the lower social-economic service. Development of such facility with considering an area accessibility to facilitate the reach on service and increasing function of sub district which has potency as service centers so that has really functioned to service its hinterland area and developing a service centers on the subordinate hierarchy.